

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN



Tahun 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <http://bbpmsoh.ditjennak.pertanian.go.id>

Nomor : 28008 /RC.330/F5.I/01/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
(LAKIN) BBPMSOH TA. 2021

28 Januari 2022

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 03064/RC.330/F1/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Penyusunan Laporan Kinerja 2021, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Besar,

Maidaswar

NIP. 196705191994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Kesehatan Hewan.



ASEAN/Vaccine/006

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



GARUDA SERTIFIKASI
INDONESIA
G.06-1D0000-XI-2019
G.05-1D0118-I-2019
G.01-1D0118-X-2021

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Tahun 2021 merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BBPMSOH selama tahun 2021 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja BBPMSOH. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPMSOH yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami semoga Laporan Kinerja BBPMSOH Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Januari 2022



drh. Maidaswar, M.Si
NIP. 196705191994031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam dokumen penetapan kinerja yang tercantum dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditandatangani bulan Desember 2020 dan revisi terakhir bulan November 2021, ditetapkan target kinerja yaitu:
 - (1) Sasaran kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja : Jumlah pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.700 produk (Hasil Uji/Sertifikat);
 - (2) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,35 skala likert;
 - (3) Sasaran kegiatan meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong dengan target 59 kelompok masyarakat.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
 - (1) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja: Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan mencapai 2.933 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (172,52%) dari target 1.700 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (**sangat berhasil**);
 - (2) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja: indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,84 skala likert (114,63%) dari target 3,35 skala likert (**sangat berhasil**);
 - (3) Sasaran kegiatan meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong mencapai 35 kelompok masyarakat (59,32%) dari target 59 kelompok masyarakat (**kurang berhasil**).
3. Capaian kinerja kegiatan lainnya antara lain:
 - a. BBPMSOH diakui sebagai laboratorium Referensi untuk Pengujain vaksin hewan tingkat ASEAN;
 - b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
 - c. Laboratorium tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
 - d. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
 - e. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;

- f. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010. BBPMSOH juga mengikuti uji profisiensi *Antimicrobial Susceptibility* (AMR) yang diselenggarakan oleh EQAsia yang merupakan konsorsium Internasional untuk meningkatkan kualitas diagnosa bakteri untuk pengujian AMR di kawasan Asia.
 - g. Menerima penghargaan Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - h. Menerima penghargaan Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Pertanian.
 - i. Melaksanakan tugas tambahan sebagai penanggung jawab dan pendampingan kegiatan SIKOMANDAN di provinsi Jawa Barat.
4. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2021 sebesar Rp 38.119.220.000,00. dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 32.401.981.755,00 (85,00%). Sedangkan Realisasi PNPB Tahun 2021 mencapai Rp. 3.208.864.491,00 dari Target Rp. 2.500.000.000,00 (128,35%).
 5. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
 - a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium/BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
 - b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian pegawai yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
- Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:
- a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian dan optimalisasi sarana/fasilitas kandang pengujian, peningkatan kapasitas dan breeding hewan percobaan.
 - b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut, melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan reagen, standar zat aktif, dan *seed*antang.
 - c. Realisasi pengadaan bantuan ternak tidak sesuai target karena ketidakmampuan penyedia menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) sehingga dilakukan pemutusan kontrak.

6. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
- a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
 - d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
 - e. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Kedudukan Tugas dan Fungsi	4
1.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	5
1.6. Sumber Daya Manusia	8
1.7. Dukungan Anggaran	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Pengukuran Kinerja	18
2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	19
3. Capaian Kinerja Pendukung	40
4. Pelaksanaan Kegiatan Tambahan Sebagai Penanggung Jawab dan Pendampingan SIKOMANDAN Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	41
5. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian	42
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator kinerja dan rencana strategis Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tahun 2020-2024	16
Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tahun 2021	19
Tabel 3. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan tahun 2021.....	20
Tabel 4. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan tahun 2021 dan 2020	23
Tabel 5. Persentase peningkatan realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan tahun 2021 dan 2020	24
Tabel 6. Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020-2024	24
Tabel 7. Capaian realisasi meningkatnya kualitas layanan publik terhadap Layanan BBPMSOH	27
Tabel 8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan BBPMSOH Tahun 2021.....	30
Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH Tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020	31
Tabel 10. Persentase peningkatan kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH Tahun 2021 dan 2010	31
Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik BBPMSOH Tahun 2021 dibanding dengan Target Jangka Menengah	32
Tabel 12. Data capaian realisasi penyediaan sapi terhadap target kinerja	36

Tabel 13.	Rekapitulasi data Realisasi pengadaan ruminansia potong	37
Tabel 14.	Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	44
Tabel 15.	Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2021	46
Tabel 16.	Realisasi per jenis belanja tahun 2021 dan 2020	47
Tabel 17.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH tahun 2021	47
Tabel 18.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan struktur organisasi BBPMSOH	8

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi BBPMSOH	52
LAMPIRAN 2 Dokumen Perjanjian Kinerja BBPMSOH Tahun 2021.....	53
LAMPIRAN 3 Sertifikat Akreditasi ASEAN, Akreditasi ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 dan	58
LAMPIRAN 4 Sertifikat WBK, Sertifikat ISO 37001:2016 dan Sertifikat ISO 45001:2018	62
LAMPIRAN 5 Rekapitulasi Capaian Fisik Tahun 2021 dan Nilai Kinerja BBPMSOH berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2021.....	65
LAMPIRAN 6 Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per jenis output kegiatan per 31 Desember 2021.....	67
LAMPIRAN 7 Data Sumberdaya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31 Desember 2021.....	69
LAMPIRAN 8 Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert 2021	71
LAMPIRAN 9 Dokumen Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak (Pengadaan Ruminasia Potong)	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan payung hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan termasuk didalamnya mengatur mengenai obat hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020, bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian mengamanatkan setiap satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi.

BBPMSOH merupakan salah satu aset nasional dan sebagai laboratorium acuan dalam hal "pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan" yang berperan dalam hal "terjaminnya mutu obat hewan" yang beredar di masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap industri obat hewan melalui pengawasan peredaran obat hewan dengan cara

pengkajian dan pemantauan terhadap obat hewan yang beredar di depo obat hewan/ distributor/importir/produsen dan/atau peternak.

Permasalahan utama dalam kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan diantaranya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya penyakit hewan yang bersifat *emerging* dan *re-emerging disease* sehingga banyak produk obat hewan dengan zat aktif baru dan kompleks seperti vaksin rekombinan, obat-obat herbal, dan obat umum dengan zat aktif baru yang memerlukan kajian dan validasi metode pengujiannya. Sehingga, BBPMSOH mempunyai peranan penting sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penjaminan mutu obat hewan yang terdaftar dan beredar di masyarakat sehingga program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dapat terlaksana dengan baik, serta turut mendukung program pemerintah pada pemenuhan pangan asal ternak menuju kedaulatan pangan di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BBPMSOH sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dan *clean government* perlu dibuat Laporan Kinerja BBPMSOH.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan BBPMSOH selama tahun 2021.
2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan selama tahun 2021.

3. Memberikan informasi tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 466/Kpts/TN.260/5/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan.

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
- c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;

- d. pelaksanaan pengkajian obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
- f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;
- g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
- h. pengelolaan hewan percobaan;
- i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
- l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
- m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
- n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
- o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;
- p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
- q. pengembangan system dan diseminasi informasi obat hewan;
- r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
- s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

1.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan

Kesehatan Hewan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBPMSOH yaitu dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh:

1. Kepala Bagian Umum; terdiri atas:
 - a. Subkelompok Program dan Keuangan;
 - b. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - c. Subkelompok Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
2. Koordinator Kelompok Pelayanan Pengujian, terdiri atas:
 - a. Subkelompok Sampel; dan
 - b. Subkelompok Hewan Percobaan dan Limbah.
3. Koordinator Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama, terdiri atas:
 - a. Subkelompok Sertifikasi; dan
 - b. Subkelompok Pengembangan Mutu dan Kerjasama.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing unit organisasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi:

1. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerjasama, dan penyiapan evaluasi dan laporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

 - a. Penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerja sama;
 - b. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

2. Koordinator Pelayanan Pengujian

Koordinator Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan;
- b. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- c. Pengelolaan hewan percobaan;
- d. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

3. Koordinator Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama

Koordinator Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pemberian sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, serta pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;
- b. Pemantauan obat hewan yang beredar;
- c. Penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;
- d. penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

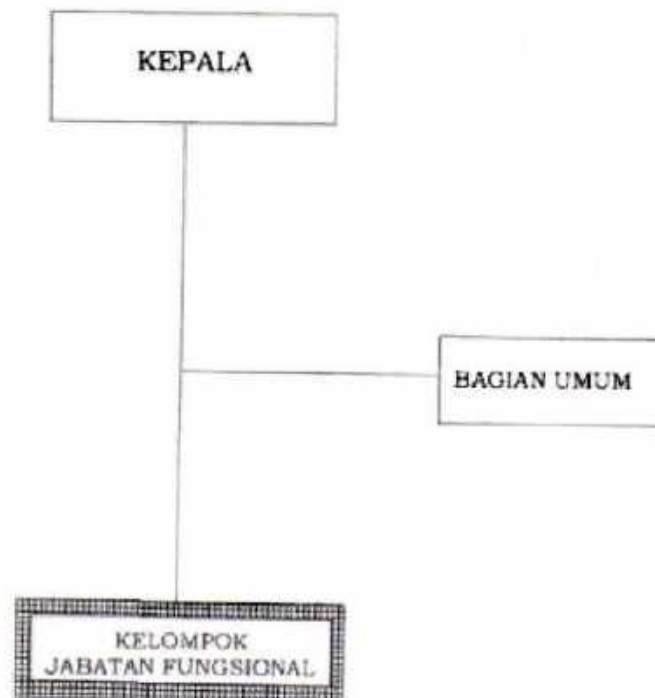
Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi

dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi BBPMSOH terdapat dalam Lampiran 1 dan pada Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Pusvetma, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB dan BBPTU-HPT Baturraden



Gambar 1 Bagan struktur organisasi BBPMSOH

1.6. Sumberdaya Manusia BBPMSOH

Pada Tahun 2021, BBPMSOH memiliki sumberdaya manusia sebanyak 110 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 79 orang dan tenaga kontrak berjumlah 32 orang. Dengan rincian Pejabat struktural berjumlah 2 orang, pejabat fungsional khusus Medik Veteriner

22 orang, Paramedik Veteriner berjumlah 27 orang, Analis Kebijakan 1 orang, Perencana 1 orang, Analis Pengelola Keuangan APBN 1 orang, Analis Kepegawaian 2 orang, Arsiparis 1 orang, dan Pustakawan 1 orang. Sedangkan fungsional umum berjumlah 19 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 2 orang, S2 (Master dan Dokter Hewan) sebanyak 24 orang, S1/D4 sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 11 orang, dan jenjang pendidikan SLTA/SPP-SNAKMA atau yang dibawahnya sebanyak 31 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah pegawai 117 orang, maka jumlah pegawai pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah pegawai. Perubahan pegawai terjadi oleh adanya pegawai yang pensiun sebanyak 2 orang, dan tenaga kontrak yang mengundurkan diri sebanyak 5 orang.

1.7. Dukungan Anggaran

BBPM SOH mendapatkan alokasi anggaran awal pada tahun 2021 sebesar Rp 50.599.247.000,00. Selanjutnya pagu anggaran sampai dengan Desember 2021 telah diterbitkan DIPA Revisi Penyesuaian Anggaran sehingga alokasi anggaran BBPM SOH Tahun 2021 menjadi Rp 38.119.220.000,00. Dukungan anggaran BBPM SOH berdasarkan *output* kegiatan Tahun Anggaran 2021 yaitu:

Kegiatan	Kode Output		Target Fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk (Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan)	1.700 Produk	10.810.999.000
	JUMLAH (1784)			10.810.999.000
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Temak (1785)	1785.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	250.000.000
	1785.QEH	Bantuan kelompok Masyarakat (Sapi Potong)	59 Kelompok Masyarakat	15.838.642.000
	JUMLAH (1785)			16.088.642.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.EAA	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran)	1 Layanan	10.971.012.000
	1787.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	204.984.000
	1787.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	1 Layanan	40.000.000
	1787.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Layanan	3.583.000
	JUMLAH (1787)			11.219.579.000
JUMLAH			38.119.220.000	

Sumber Data: Subkelompok Program dan Keuangan BBPM SOH, 2021

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BBPMSOH dipengaruhi oleh lingkungan strategis unit kerja, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengaruh internal dan eksternal unit kerja saling terkait erat. Untuk itu, perlu dilaksanakan analisis lingkungan strategis pada unit kerja.

Penyusunan perencanaan strategis BBPMSOH dikembangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih aspiratif dan partisipasi yang diarahkan pada pencapaian *"good governance"* secara substansial yang berujung pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

1. Visi

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Dan Keamanan Pangan Asal Ternak". Maka, Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu :

"Terjaminnya mutu obat hewan yang diregistrasi dan beredar di Indonesia."

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (Registrasi);
 - b. Pelayanan teknis;

2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu;
 - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas;
 - c. Pengkajian Obat Hewan;
 - d. Pemantauan Obat Hewan.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

3. Tujuan

Tujuan untuk menjamin mutu obat hewan yang terdaftar dan beredar di Indonesia yaitu dengan cara:

1. Meningkatnya pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 1.800 produk (sertifikat/Hasil Uji).
2. Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak yang merupakan penugasan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa Bantuan Ternak Ruminansia Potong sebanyak 1.180 ekor untuk didistribusikan pada 59 kelompok masyarakat.

3. Meningkatnya Kepuasan Layanan Publik BBPMSOH dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 3.45 skala likert (1-4) pada tahun 2024.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja BBPMSOH adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (Registrasi);
 - b. Pelayanan teknis;
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu;
 - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas;
 - c. Pengkajian Obat Hewan;
 - d. Pemantauan Obat Hewan.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

5. Kebijakan

Beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan dalam periode 2020 -2024 sebagai berikut :

- a. Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses registrasi, pengujian mutu, dan pengawasan melalui pelayanan satu atap di BBPMSOH.
- b. Kebijakan peningkatan kesehatan hewan, peningkatan populasi dan optimalisasi produksi peternakan melalui penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.
- c. Kebijakan peningkatan pelayanan prima (*quick wins*) kepada masyarakat peternakan dan veteriner.
- d. Kebijakan peningkatan pelayanan pengujian obat hewan dengan pemberdayaan dan pembinaan laboratorium di daerah.
- e. Kebijakan peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
- f. Kebijakan peningkatan pembinaan, sosialisasi dan diseminasi regulasi, hasil karya ilmiah di bidang obat hewan kepada pelaku usaha/ *stakeholder* BBPMSOH.
- g. Kebijakan pembinaan dan kerjasama serta koordinasi pengawas obat hewan di daerah.
- h. Kebijakan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat hewan di tingkat ASEAN.

6. Program

Dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran sesuai kebijakan dan strategi BBPMSOH, maka BBPMSOH melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sedangkan Kegiatan BBPMSOH mengacu kepada kegiatan Eselon II (Direktorat Kesehatan Hewan) yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya BBPMSOH melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan sasaran yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (registrasi) obat hewan;
 - b. Pelayanan teknis;
2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu;
 - b. Pengujian Kiriman Dinas;
 - c. Pengkajian virologi;
 - d. Pengkajian Bakteriologi;
 - e. Pengkajian Patologi;
 - f. Pengkajian Farmasetik Premiks;
 - g. Pemantauan obat hewan.
3. Penguatan Kelembagaan UPT, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Sistem Mutu/Akreditasi Laboratorium;
 - b. Kegiatan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian;

- c. Kegiatan bimbingan administrasi dan teknis Pengujian Obat Hewan;
 - d. Rapat koordinasi nasional dan kegiatan Diseminasi informasi hasil pengujian Obat Hewan;
 - e. Pembinaan pembangunan karakter Pegawai BBPMSOH;
 - f. Peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH;
 - g. Pelaksanaan kegiatan K3;
 - h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi / perpustakaan yang berbasis teknologi informatika;
 - i. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahan-bahan standar, dan bahan penunjang, serta kebutuhan untuk operasionalisasi BSL-3;
- B. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sasaran yaitu:
- 1. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Laboratorium;
 - 2. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium/kantor serta pengelolaan limbah;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;
 - 4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - 5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
 - 6. Pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran.
- C. Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak dengan sasaran yaitu:
- 1. Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak berupa kegiatan pengadaan sapi potong lokal sebanyak 1.180 ekor untuk diberikan pada 59 kelompok tani.
 - 2. Koordinasi, pembinaan dan pelaporan kegiatan UPT/OPD berupa kegiatan penanggung jawab dan pendampingan kegiatan SIKOMANDAN di provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2020-2024.

TUJUAN/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan)	Jumlah layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	Produk (Hasil Uji/ Sertifikat)	1.410	1.700	1.650	1.760	1.800
	Kelembagaan Veteriner	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium)	Unit Kegiatan	1	-	-	-	-
Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak	Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak	Kelompok Masyarakat	-	59	70 (1750 ekor)	50	50
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya Kualitas layanan publik terhadap Layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BBPMSOH (Skala Likert 1-4)	Skala Likert	3.20	3.35	3.40	3.42	3.45

Sumber Data: Lampiran Renstra Revisi 1 BBPMSOH 2020-2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH dalam melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, maka dibuat penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan)	Jumlah Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.700 Produk (Hasil Uji/Sertifikat)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas Layanan Publik BBPMSOH	3,35 skala Likert
Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong	59 Kelompok Masyarakat

Dokumen Perjanjian Kinerja tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan penandatanganannya pada bulan Desember 2020. Pada bulan April 2021 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran karena adanya revisi *refocusing* anggaran tahun 2021. Selanjutnya pada bulan November 2021 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 karena adanya penyesuaian target dan anggaran berupa penambahan anggaran dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta adanya Revisi Pagu PNBP BBPMSOH karena realisasi PNBP telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. Sasaran kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

- (1) Sasaran kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan), dengan indikator kinerja: jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.700 produk (sertifikat/hasil uji).
- (2) Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja: indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,35 skala likert; dan
- (3) Sasaran kegiatan Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong dengan target 59 kelompok masyarakat.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacaraReviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2021 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2020);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2021 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan melalui metode *scoring*, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian > 100%)
2. Berhasil (capaian 80 - 100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60 - <80%)
4. Kurang berhasil (capaian < 60%)

2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, BBPMSOH mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BBPMSOH tahun 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.700	2.933	172,52	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas Layanan Publik BBPMSOH	3,35	3,84	114,62	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong	59	35	59,32	Kurang Berhasil

1. Sasaran kegiatan meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja: jumlah layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.700 produk (Sertifikat/Hasil Uji).

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan sasaran kegiatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dengan indikator kinerja: jumlah layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dengan target 1.700 Produk (Sertifikat/Hasil Uji) merupakan target total dari beberapa indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2021 dan 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target Jangka Menengah (Tahun 2024)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Realisasi 2021 terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	% Realisasi 2021 terhadap Target Jangka Menengah (2024)
Meningkatnya Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	1.700	1.800	2.332	2.933	172,52%	125,77%	162,94%

Kegiatan peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, sebagaimana sesuai dalam lampiran 5 dengan rincian indikator kinerja (1): Pengujian sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi); (2) Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis ; (3) Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan) ; (4) Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas; (5) Jumlah sampel pengkajian obat hewan; (6) Jumlah sampel pemantauan obat hewan dengan jumlah total target sesuai Renstra yaitu 1.700 sampel. Penjelasan pencapaian kinerja tersebut yaitu:

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Pada tahun 2021 realisasi pencapaian kegiatan meningkatnya pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, mencapai 2.933 sampel (172,52%) dari target 1.700 sampel (**sangat berhasil**). Rincian realisasi tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran 5 terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang sudah selesai uji yaitu sampel registrasi sebanyak 823 sampel, sampel pengujian sewaktu-waktu sebanyak 114 sampel, sampel kiriman dinas sebanyak 299 sampel, sampel pelayanan teknis sebanyak 63 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan sebanyak 1.441 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 193 sampel. Dengan demikian total jumlah sampel yang tercapai sebanyak 2.933 sampel. Rincian realisasi indikator kinerja tahun 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini terdiri dari :

- 1) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).
- 2) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian dilakukan pengujian obat tersebut di BBPMSOH untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab.III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran.

Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 (tiga) tahun terakhir.

- 3) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.
2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan.
Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2021 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian virologi vaksin *Avian Influenza (AI)* dan *Rabies*, pengkajian bakteriologi *Brucella* dan *Probiotik* dan pengkajian mutu obat hewan sediaan antibiotik.
3. Kegiatan pemantauan obat hewan tahun 2021 berupa pemantauan obat hewan berorientasi ekspor bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas obat hewan dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan obat hewan di lapangan ini dimaksudkan untuk:
 - a. Melindungi konsumen dari pemakaian obat hewan yang tidak bermutu;
 - b. Mempertahankan mutu obat hewan di lapangan;
 - c. Mengetahui faktor penurunan mutu, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik

importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ Importir/ distributor/ pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 2.933 sampel (172,52%) dari target 1.700 sampel. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2020 yaitu diperoleh realisasi sebanyak 2.332 sampel maka pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam pencapaian total realisasi sampel sebesar 25,77%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan sampel obat hewan dalam rangka daftar ulang atau daftar baru karena sudah habisnya masa berlaku nomor registrasi obat hewan. Selain itu sampel obat hewan dalam rangka pemantauan yang diambil berupa produk farmasetik sehingga jumlah sampel yang diambil lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk sampel pengkajian bakteriologi dan virologi, dilakukan pengambilan sampel vaksin brucella, serum sapi dan serum unggas sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan Tahun 2021 dan 2020.

Target dan Realisasi Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	%Realisasi th 2021 thd 2020
Target	1.610	1.410	1.700	1.700	1.750	1.800		
Realisasi	2.143	2.332	2.933				172,52%	125,77%

Tabel 5. Persentase peningkatan realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan Tahun 2021 dan 2020.

No.	Kegiatan	Realisasi Tahun 2020 (Sampel)	Realisasi Tahun 2021 (Sampel)	(%) Peningkatan
1.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	2.332	2.933	25,77%

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2021

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Capaian jumlah sampel pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan rencana target tahun 2020-2024, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020-2024

Target dan Realisasi Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	% Realisasi th 2021 thd 2020	% Realisasi th 2021 thd Target Jangka Menengah (2024)
Target	1.610	1.410	1.700	1.700	1.750	1.800			
Realisasi	2.143	2.332	2.933				172,52%	125,77%	162,94%

Beberapa faktor penyebab peningkatan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dari penerimaan sampel obat hewan diantaranya:

1. Sampel dari kegiatan pengujian dalam rangka sertifikasi/registrasi dan sampel daftar ulang produk obat hewan serta sampel kiriman dinas meningkat seiring bertambahnya informasi dan meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

2. Sampel dari kegiatan pemantauan obat hewan meningkat jumlahnya karena pada tahun 2021 melaksanakan pemantauan obat hewan produk farmasetik dengan sampel lebih banyak dibandingkan tahun 2020.
3. Terjadinya kenaikan jumlah sampel yang diperoleh yaitu karena sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas dan sapi) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja secara nasional ini, maka realiasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH belum dapat dibandingkan dengan data standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena:

1. Meningkatnya registrasi obat hewan baik daftar baru atau daftar ulang di Indonesia menyebabkan pengujian obat hewan dalam rangka registrasi di BBPMSOH menjadi naik.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH.
3. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari BBPMSOH.

4. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian target pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di tahun mendatang antara lain dengan melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi; mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pagu anggaran output pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan yaitu Rp 10.810.999.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.799.767.277,00 dengan efisiensi sebesar 42,10% dan nilai efisiensi sebesar 155,25%. Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Efisiensi} &= \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\% \\
&= \frac{(10.810.999.000 \times 173\%) - 10.799.767.277}{(10.810.999.000 \times 173\%)} \times 100\% \\
&= 42,10\% \\
\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) \\
&= 50\% + \left(\frac{42,10}{20} \times 50 \right) \\
&= 155,25\%
\end{aligned}$$

2. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,35 skala likert.

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian realisasi meningkatnya kualitas layanan publik terhadap Layanan BBPMSOH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Target Kinerja Jangka Menengah (2024)	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Realisasi 2021	% Realisasi 2021 Terhadap 2020	% Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah
Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH	3,35 Skala Likert	3,45 Skala Likert	3,48 Skala Likert	3,84 Skala Likert	114,62%	110,34%	111,30%

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Penilaian responden dilakukan dengan mengisi kuisioner secara online dari pihak masyarakat melalui alamat laman www.ikm.pertanian.go.id. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman kepada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan publik Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan pedoman tersebut metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Responden dipilih secara acak untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan survei. Didalam kuesioner tersebut terdapat 9 unsur

penting yang mencakup unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

1. **Persyaratan pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
3. **Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam kesesuaian produk pelayanan dengan hasil maksimal yang diberikan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
8. **Penanganan Pengaduan pengguna Layanan**, yaitu penanganan pengaduan pengguna layanan dapat memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan;
9. **Kualitas sarana dan Prasarana**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap hasil pengolahan data SKM, maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan Nilai Rata-Rata Tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan. Adapun kriteria

hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, sebagaimana dalam tabel berikut:

Interprestasi Hasil Pengukuran SKM Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Realisasi kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,84 skala likert (114,62%) dari target 3,35 skala likert (**sangat berhasil**). Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BBPMSOH dilaksanakan berdasarkan Lampiran III Pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian masuk dalam kategori "A" Sangat Baik. Rincian capaian berdasarkan unsur-unsur dalam survey kepuasan masyarakat tersebut yaitu:

No	Unsur SKM	Nilai per Unsur	NRR per Unsur	Nilai Indeks
1	Persyaratan (U1)	781	3,964	0,440
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	777	3,944	0,438
3	Waktu Penyelesaian (U3)	776	3,939	0,438
4	Biaya/Tarif (U4)	592	3,005	0,334
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	777	3,944	0,438
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	783	3,974	0,442
7	Perilaku Pelaksana (U7)	783	3,974	0,442
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan (U8)	787	3,994	0,443
9	Sarana dan Prasarana (U9)	784	3,979	0,442
	IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	96,425	3,857	
	Mutu Pelayanan	A	Sangat Baik	

Berdasarkan nilai unsur pada tabel tersebut diatas, untuk unsur biaya dan tarif pelanggan mendapat penilaian paling rendah karena responden menilai tarif untuk pelayanan pengujian obat hewan masih cukup mahal. Sedangkan untuk unsur lainnya seperti persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan sudah sangat sesuai, kemudahan prosedur layanan sangat mudah, kecepatan waktu layanan cepat, kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diberikan sangat sesuai, penanganan pengaduan pengguna layanan dikelola dengan baik, kualitas sarana dan prasarana sangat baik. Secara rinci capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BBPMSOH Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH Tahun 2021

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik	
Target 3,35 Skala likert	Realisasi 3,84 Skala likert
% Capaian 114,62%	

Berdasarkan sistem IKM daring tersebut diperoleh nilai yaitu 96. Jika dikonversi kedalam skala likert maka perhitungannya yaitu :

$$\text{Nilai IKM Skala Likert} = \frac{\text{Nilai IKM}}{100} \times 4 = \frac{96}{100} \times 4 = 3,84 \text{ skala likert.}$$

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan nilai IKM BBPMSOH tahun 2021 jika dibandingkan dengan data yang tersedia pada tahun 2020 dengan nilai IKM BBPMSOH mencapai 3,48. Maka nilai IKM BBPMSOH tahun 2021 mengalami peningkatan 0,36 *point* atau 10,34% dari tahun 2020 dan masuk dalam kategori “sangat baik”. Perbandingan capaian realisasi pelaksanaan kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH Tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan BBPMSOH Tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020

Target dan Realisasi IKM (Skala Likert)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	%Realisasi th 2021 thd 2020
Target IKM	3,00	3,20	3,35	3,40	3,42	3,45		
Realisasi IKM	3,50	3,48	3,84				114,62%	110,34%

Tabel 10. Persentase peningkatan kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH Tahun 2021 dan 2010.

No.	Kegiatan	Realisasi Tahun 2020 (Kegiatan)	Realisasi Tahun 2021 (Kegiatan)	(%) Peningkatan
1.	Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas Layanan Publik terhadap layanan BBPMSOH	3,48	3,84	10,34

Sumber Data: Bagian Umum, 2021

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024, yaitu target pada 2024 dengan nilai IKM 3,45 skala likert, maka nilai IKM 3,84 skala likert pada tahun 2021 ini telah tercapai melebihi target jangka menengah sampai tahun 2024. Dengan demikian diharapkan layanan BBPMSOH terhadap layanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai maksimal. Dilihat dari capaian kinerja tahun 2021 berhasil mencapai sebesar 111,30% dari target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024. Nilai IKM BBPMSOH dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Secara rinci perbandingan nilai IKM BBPMSOH pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik BBPMSOH Tahun 2021 dibanding dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi IKM (Skala Likert)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% Realisasi thd Target 2021	% Realisasi th 2021 thd 2020	%Realisasi th 2021 thd Target Jangka menengah
Target IKM	3,00	3,20	3,35	3,40	3,42	3,45			
Realisasi IKM	3,50	3,48	3,84				114,62%	110,34%	111,30%

Sumber Data: Bagian Umum BBPMSOH, 2021

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH dengan standar nasional.

Realiasi kinerja tahun 2021 berupa IKM BBPMSOH dengan nilai 3,84 Skala Likert jika dibandingkan dengan IKM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada semester 1 Tahun 2021 dengan nilai rata-rata 88,1 atau 3,52 Skala Likert, maka capaian BBPMSOH telah tercapai realisasi melebihi standar Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

BBPMSOH selalu meningkatkan semua unsur tersebut agar pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Pada tahun 2021 telah ditetapkan yakni Standar Pelayanan Publik (SPP) Nomor 00025/Kpts/OT.080/F5.I/01/2021. Didalamnya terdapat kesembilan unsur utama pelayanan yang dapat diakses melalui website <http://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id/> atau datang langsung di Unit Layanan Terpadu BBPMSOH. Petugas dalam melayani pelanggan selalu mendapatkan pelatihan keterampilan dan wawasan serta kecepatan dalam merespon pengaduan masyarakat juga menjadi pengungkit peningkatan layanan sehingga output kinerja yang dilakukan terhadap pengguna layanan menjadi lebih optimal.

Selain perbaharuan Website dan keterampilan SDM yang selalu dimutakhirkan, BBPMSOH pada tahun 2019 meluncurkan aplikasi SIHAPSOH yang merupakan terobosan baru untuk mempermudah pelanggan BBPMSOH untuk melakukan pengujian mutu obat hewan secara online. Pengembangan aplikasi SIHAPSOH memenuhi

harapan pelanggan di masa pandemic covid-19 seperti saat ini. Pelanggan tidak perlu datang langsung atau menghubungi melalui telepon, cukup mengunduh aplikasi SIHAPSOH, maka pelanggan dapat mengirimkan persyaratan dokumen dan mengigirmkan sampel lewat ekspedisi untuk pengujian obat hewan.

Kemudahan-kemudahan dalam pelayanan tersebut memberikan pelanggan atau pengguna layanan untuk memberikan apresiasi terhadap layanan dengan memberikan nilai yang baik atas kepuasan layanan yang diberikan. Disamping itu, faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian penilaian IKM dari masyarakat yang diatas target ini disebabkan karena pelayanan BBPMSOH sudah sesuai standar Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi ASEAN sebagai *ASEAN reference laboratory for animal vaccine testing*, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Mutu Anti Penyuapan serta ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat.

f. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Peningkatan kualitas pelayanan publik di BBPMSOH didukung oleh komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan prima. Sumber daya manusia yang kompeten penyediaan sarana dan prasarana serta pembangunan zona integritas dalam mewujudkan layanan yang bersh dan bebas dari korupsi. Sejak tahun 2013, BBPMSOH telah membangun pembangunan zona integritas dalam upaya meningkatkan layanan publik. BBPMSOH telah menyelenggarakan penandatanganan komitmen bersama yang didalamnya termasuk pelayanan prima dan keterbukaan informasi publik. Seluruh pegawai berkomitmen dalam mengimplementasikan pelayanan publik dan menerapkan tata laksana SNI ISO 17015:2017, SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016 dan SNI ISO 45001:2018.

dipastikan layanan yang diberikan kepada pelanggan baik eksternal maupun internal akan maksimal atau mencapai titik pelayanan prima. Kondisi tersebut yang menjadikan para pengguna layanan BBPMSOH memberikan penilaian yang sangat baik atas kinerja pelayanan. Komitmen keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kinerja IKM. Dengan banyaknya kanal yang mudah diakses mengenai layanan pengujian obat hewan dan keterbukaan informasi pengguna layanan lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komitmen dalam memberikan layanan yang bersih dan bebas dari korupsi yang terus ditingkatkan oleh BBPMSOH, hingga pada tahun 2021 BBPMSOH berhasil meraih WBK lingkup Kementerian Pertanian dan meraih penghargaan sebagai Wilayah Bersih dari Korupsi Nasional oleh KemenPAN RB.

g. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka untuk terus meningkatkan pencapaian kinerja ditahun mendatang melalui upaya untuk terus meningkatkan dan mempercepat pelayanan dengan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat optimal dan selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu, BBPMSOH juga telah mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dimana masyarakat dapat mengetahui pengujian sampelnya melalui aplikasi dimaksud dan dapat diakses melalui telepon seluler sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat.

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penilaian Indeks kepuasan masyarakat merupakan dampak dari kinerja pelayanan BBPMSOH terutama dalam memberikan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dari anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga untuk melihat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis penilaian IKM tersebut dapat berasal dari anggaran tersebut diatas. Efisiensi sebesar 0,27% dan nilai efisiensi sebesar 50,68%. Dengan demikian nilai efisiensi yang didapatkan sebesar 50,68% dapat dikatakan **efisien** dalam pemanfaatan sumber daya.

Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{(11.219.579.000 \times 1) - 11.188.846.847}{11.219.579.000 \times 1} \times 100\%$$
$$= 0,27\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$
$$= 50\% + \left(\frac{0,27}{20} \times 50 \right)$$
$$= 50,68\%$$

3. Sasaran kegiatan meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong dengan target 59 kelompok masyarakat.

Penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Realisasi 2021	% Realisasi 2021 Terhadap Target 2020	% Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah
Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong	59 kelompok masyarakat	-	35 kelompok masyarakat	59,32%	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Dalam rangka Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak, BBPMSOH ditugaskan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan tugas tambahan yaitu melaksanakan penyediaan sapi potong asli/lokal/persilangan/eks impor Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1000 ekor atau 50 kelompok tani sesuai surat tugas Nomor : 28071/PK.010/F/05/2021 tanggal 28 Mei 2021. Kemudian pada tanggal 1 September 2021 mendapat penambahan alokasi anggaran Satker Lingkup Dirjen PKH pada kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Komoditas Sapi potong (revisi ke-9), BBPMSOH mendapat penambahan tugas penyediaan sapi sebanyak 180 ekor atau 9 kelompok tani. Sehingga total pengadaan ruminansia potong menjadi 1.180 ekor sapi dengan kelompok masyarakat penerima manfaat sebanyak 59 kelompok.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Ternak Ruminansia Potong Komoditas Sapi potong, BBPMSOH membentuk Tim teknis (tim pelaksana kegiatan) yang tertuang dalam SK Kepala Balai No.00055/Kpts/OT.050/F.5.1/08/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 dengan tugas dan wewenang untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Berdasarkan Tabel 12. pencapaian sasaran strategis meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta produksi ternak dengan indikator kinerja jumlah kelompok masyarakat dengan target 59 kelompok tani hanya 35 kelompok tani (59,32%) yang mendapatkan distribusi sapi **(kurang berhasil)**. Sedangkan 24 kelompok tani lainnya (40,68%) tidak mendapatkan distribusi sapi.

Tabel 12. Data capaian realisasi penyediaan sapi terhadap target kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Realisasi 2021	% Realisasi 2021
Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong	59	35	59,32

Rincian rekapitulasi data realisasi pengadaan ruminansia potong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Rekapitulasi data Realisasi

No	Paket Pengadaan	Target kelompok	Realisasi	% Realisasi	Keterangan
Tahap 1					
1.	Pengadaan Sapi Potong Lokal untuk Wilayah Provinsi Jawa Timur	38	14*	36,8	24 kelompok tidak mendapatkan distribusi sapi
2.	Pengadaan Sapi Potong Lokal untuk Wilayah Provinsi Banten	4	4	100	-
3.	Pengadaan Sapi Potong Lokal untuk Wilayah Provinsi Maluku	4	4	100	-
4.	Pengadaan Sapi Potong Lokal untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara	4	4	100	-
		50	26*	52	
Tahap 2					
	Pengadaan Sapi Potong Provinsi Jawa Timur	8	8	100	
	Pengadaan Sapi Potong Provinsi Banten	1	1	100	
	Total	9	9	100	
JUMLAH		59	35	59,32	

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa kelompok tani yang tidak mendapatkan distribusi sapi adalah dari pengadaan sapi di Provinsi Jawa Timur tahap 1. Hal ini dikarenakan penyedia paket pengadaan sapi potong untuk wilayah provinsi Jawa Timur menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan (terlampir surat pernyataan dari penyedia). Beberapa kendala yang terjadi di lapangan antara lain adalah :

1. Nilai penawaran harga penyedia rendah (76% dari nilai Harga perkiraan sendiri (HPS)).
2. Penyedia tidak optimal dalam melakukan pekerjaan dilapangan
3. Kurangnya kemampuan finansial penyedia.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Kegiatan pengembangan Ruminasia Potong tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 karena kegiatan ini baru menjadi tugas tambahan BBPMSOH pada tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Kegiatan Sasaran strategis meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta produksi ternak dengan indikator kinerja sampai dengan Tahun 2024 pengembangan Ruminasia Potong belum dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 karena kegiatan ini baru menjadi tugas tambahan BBPMSOH pada tahun 2021

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja kegiatan pengembangan Ruminasia Potong secara nasional ini, maka realiasi kinerja tersebut tahun 2021 BBPMSOH belum dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja.

Faktor penyebab kurang berhasilnya pencapaian kinerja kegiatan pengadaan ruminasia potong dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Internal.

Kegiatan pengadaan/penyediaan ruminansia potong merupakan kegiatan penugasan pertama kali di BBPMSOH sehingga belum mempunyai pengalaman dalam mengantisipasi setiap risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan

2. Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh Satker. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kurang

berhasilnya penyediaan sapi potong di BBPMSOH sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan pekerjaan baru dimulai pada bulan September 2021 dikarenakan Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit TA 2021 diterima bulan Juni 2021, dan proses tender (konsolidasi) pada bulan Juli-Agustus 2021.
- b. Rekanan/penyedia
 - i. Ketidakcermatan penyedia dalam pengukuran ternak sehingga beberapa ternak tertolak oleh tim teknis karena dibawah spesifikasi yang sudah ditentukan akibatnya terjadi perpanjangan waktu untuk penyediaan ternak yang baru.
 - ii. Nilai penawaran harga penyedia rendah (76% dari nilai Harga perkiraan sendiri (HPS).
 - iii. Ketidaksanggupan penyedia menyelesaikan pekerjaan/Wanprestasi sehingga terjadi pemutusan kontrak .

f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan

Untuk kegiatan pengadaan ternak pada tahun depan diharapkan agar dapat lebih cermat dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri ternak yang ada di lapangan serta melaksanakan proses pengadaan dengan memastikan kualifikasi penyedia yang sesuai dengan spesifikasi dan dukungan modal yang kuat serta mempunyai surat dukungan dari supplier ternak.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis efisiensi kegiatan pengadaan ruminasia potong diambil dari anggaran Peningkatan Benih dan Bibit serta Produksi Ternak. Efisiensi sebesar -8,21% dan nilai efisiensi sebesar 29,48%. Hal ini karena realisasi capaian fisik yang tidak mencapai target. Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Efisiensi} &= \frac{(\text{Pagu anggaran keluaran} \times \text{Capaian Keluaran}) - \text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Keluaran}} \times 100\% \\
&= \frac{(15.838.642.000 \times 59\%) - 10.167.050.491}{15.838.642.000 \times 59\%} \times 100\% \\
&= -8,21\% \\
\text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right) \\
&= 50\% + \left(\frac{-8,21}{20} \times 50 \right) \\
&= 29,48\%
\end{aligned}$$

3. Capaian Kinerja Pendukung

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2021 yang merupakan capaian awal target jangka menengah dalam Rencana Strategis BBPMSOH 2020-2024 dapat diinformasikan capaian kinerja pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Telah menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai *Focal Point* ASEAN untuk pengujian vaksin;
2. Telah mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
3. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
4. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
5. Memperoleh Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Telah menerapkan Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dan Sistem Monitoring Mutu Obat Hewan Indonesia (SIMOHI) bagi para pengguna jasa BBPMSOH.
7. Menjadi laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-

Deventer Belanda) yang telah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010.

Selain penghargaan dan capaian kinerja tersebut diatas, capaian kegiatan kinerja lainnya di BBPMSOH antara lain:

1. Pelaksanaan kalibrasi peralatan dan Penyebaran Informasi hasil pengujian mutu obat hewan melalui Buletin Pengujian Mutu Obat Hewan;
2. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;

4. Pelaksanaan kegiatan tambahan sebagai Penanggung Jawab dan pendampingan SIKOMANDAN Wilayah Provinsi Jawa Barat

Sebagai penanggung jawab untuk pendampingan kegiatan SIKOMANDAN, BBPMSOH bertanggung jawab dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pokja SIKOMANDAN Jawa Barat. Terkait hal tersebut beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BBPMSOH antara lain adalah :

1. Melaksanakan pertemuan Koordinasi Akselerasi Pencapaian SIKOMANDAN provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Maret 2021 secara virtual zoom yang diikuti oleh dinas kabupaten/kota se-Jawa Barat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
2. Melaksanakan pertemuan *Refreshment* Petugas IB dan rekorder SIKOMANDAN se-Jawa Barat pada tanggal 13 – 14 Oktober 2021 di hotel Grandia Bandung.
3. Mengikuti pertemuan evaluasi Kinerja kegiatan SIKOMANDAN provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 – 18 November 2021 di hotel Grandia Bandung.

Melaksanakan pertemuan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SIKOMANDAN provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 – 9 Desember 2021 di hotel Swissbell, Tangerang Selatan yang dihadiri oleh Petugas IB dan

rekorder SIKOMANDAN dari dinas kabupaten/kota se-Jawa Barat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

5. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya manusia, antara lain:

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Uji Laboratorium dan Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
2. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

1. Adanya beberapa sampel obat hewan yang datang pada bulan Desember 2021, sehingga pengujian baru dapat diselesaikan pada Tahun 2022.
2. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan *seed*antang yang belum tersedia.
4. Sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas dan sapi) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, swab nasal, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang

lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

5. Hasil monitoring dan evaluasi kegiatan SIKOMANDAN tahun 2021 di provinsi Jawa Barat ditemukan adanya beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain :
 - a. Banyaknya inseminasi ternak sapi perah menggunakan semen beku sapi potong karena permintaan peternak.
 - b. Ketersediaan kontainer depo di Kabupaten/Kota sudah tidak memadai baik dari segi kondisi kontainer maupun jumlah kontainer, sehingga penyimpanan semen beku di Kabupaten/Kota sudah tidak efisien.
 - c. Ketersediaan peralatan IB berupa plastik sheath dan plastik glove bagi pendukung kegiatan petugas inseminator sangat kurang apabila dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan, sehingga penggunaan peralatan IB yang seharusnya hanya untuk sekali pemakaian, terpaksa digunakan kembali dengan terlebih dahulu disanitasi.

Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah:

1. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia,

Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.

4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu.
5. Melengkapi standar zat aktif dan *seed/kuman*antang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun.
6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian.
7. Merencanakan kegiatan dan berkoordinasi secara optimal dengan instansi terkait untuk proses pengambilan sampel pengkajian, dan pemantauan obat hewan agar sampel dapat diperoleh sesuai target yang ditetapkan.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota.
9. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium serta pembuatan ruang arsip yang memadai untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang.
10. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnatugas.
11. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016.
12. Upaya yang sudah dilakukan untuk pemecahan kendala/masalah kegiatan SIKOMANDAN yaitu dengan terus mengintensifkan informasi kepada petugas inseminator untuk tidak menggunakan

semen beku sapi potong untuk melakukan IB kepada akseptor sapi perah dan bersurat kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI untuk dapat memfasilitasi kontainer depo dan peralatan IB berupa plastik sheath dan plastik glove bagi Kabupaten/Kota di Jawa Barat demi mendukung keberhasilan Kegiatan SIKOMANDAN.

B. Realisasi Anggaran

BBPMSOH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan alokasi pagu anggaran awal pada tahun 2021 sebesar Rp 50.599.247.000,00 untuk mendukung program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen. Namun demikian, sampai dengan November 2021 telah diterbitkan DIPA Revisi Penyesuaian Anggaran sehingga alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2021 menjadi Rp 38.119.220.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 32.401.981.755,00 (85,00%). Realisasi anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,82% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk pengadaan bantuan ternak ruminasia potong pada tahun 2021.

Sedangkan berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, BBPMSOH mendapat Nilai Kinerja sebesar 89,78 dengan komponen nilai penyerapan anggaran sebesar 85%, Konsistensi 86,71%, Capaian Realisasi Output 100% efisiensi sebesar 11,13% dan nilai efisiensi sebesar 77,82%. Nilai tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 merupakan penilaian dari sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dengan komponen penilaian dari aspek serapan anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir serta capaian keluaran kegiatan.

Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021 sebesar 89,78 jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020 sebesar 94,16 mengalami penurunan sebesar 4,65. Hal ini karena adanya capaian output berupa

pengadaan ruminansia potong yang tidak mencapai 100% sehingga nilai capaian output secara keseluruhan menjadi menurun.

Data realisasi per jenis output dengan angka efisiensi dan nilai efisiensi serta realisasi menurut jenis belanja tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Kegiatan	Kode Output		Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Fisik (%)	Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk (Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan)	1.700 Produk	2.933 Produk (Hasil Uji/Sertifikat)	172,52	10.810.999.000	10.799.767.277	99,90	42,10%	155,25%
	JUMLAH (1784)					10.810.999.000	10.799.767.277	99,90		
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)	1785.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	250.000.000	246.317.140		1,47%	53,68%
	1785.CEH	Bantuan kelompok Masyarakat (Sapi Potong)	59 Kelompok Masyarakat	35 Kelompok Masyarakat	59,32	15.838.642.000	10.167.050.491		-8,21%	29,48%
	JUMLAH (1785)					16.088.642.000	10.413.367.631	64,72		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00	10.971.012.000	10.947.830.173		0,21%	50,53%
	1787.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	204.984.000	197.828.674		3,49%	58,73%
	1787.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	1 Layanan	1 Layanan	100,00	40.000.000	39.800.000		0,50%	61,25%
	1787.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	3.583.000	3.390.000		5,39%	63,47%
	JUMLAH (1787)					11.219.579.000	11.188.846.847	99,73		
JUMLAH					38.119.220.000	32.401.981.755	85,00			

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

Sedangkan data realisasi anggaran menurut jenis belanja tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengantanggal 31 Desember 2021

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	6,255,178,000	6,233,850,046	99.66%
2.	Belanja Barang	27,628,992,000	21,936,142,909	79.40%
3.	Belanja Modal	4,235,050,000	4,231,988,800	99.93%
JUMLAH		38,119,220,000	32,401,981,755	85,00%

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

Tabel 16. Realisasi per jenis belanja Tahun 2021 dan 2020

No	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi Anggaran 2021 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.	Belanja Pegawai	6.182.258.459	6,233,850,046	0,83
2.	Belanja Barang	11.119.703.273	21,936,142,909	97,27
3.	Belanja Modal	7.705.499.200	4,231,988,800	(45,08)
JUMLAH		25.007.460.932	32,401,981,755	29,57

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

Dalam hal penerimaan PNBPN lingkup BBPMSOH, pada Tahun Anggaran 2021 realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 3.208.864.491,00 (128,35%) dari target Rp 2.500.000.000,00.

Realisasi penerimaan PNBPN BBPMSOH tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) BBPMSOH Tahun 2021

No	Uraian	Target PNBPN (Rp)	Realisasi PNBPN (Rp)	%
1.	Penerimaan Umum	0	142.578.491	0
2.	Penerimaan Fungsional	2.500.000.000	3.066.286.000	122,65
JUMLAH		2.500.000.000	3.208.864.491	128,35

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

Realisasi penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 27,39% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena keadaan masih dalam kondisi pandemi dan berkurangnya sampel obat hewan biologik yang masuk sehingga PNBPN yang ditarik berkurang jumlahnya, hal ini menyebabkan penerimaan PNBPN mengalami penurunan. Data realisasi penerimaan PNBPN Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Jumlah PNBP	Realisasi PNBP 2020 (Rp)	Realisasi PNBP 2021 (Rp)	% Kenaikan / Penurunan
1.	Penerimaan Umum	71.762.332	142.578.491	98,68
2.	Penerimaan Fungsional	3.281.969.610	3.066.286.000	(6,57)
	JUMLAH	3.353.732.039	3.208.864.491	(4,32)

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

BAB IV PENUTUP

1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
2. Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja: Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan mencapai 2.933 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (172,52%) dari target 1.700 produk (Hasil Uji/Sertifikat) (**sangat berhasil**);
3. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja: indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,84 skala likert (114,63%) dari target 3,35 skala likert (**sangat berhasil**);
4. Sasaran kegiatan meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, dengan indikator kinerja : Jumlah kelompok masyarakat yang menerima bantuan ternak ruminansia potong mencapai 35 kelompok masyarakat (59,32%) dari target 59 kelompok masyarakat (**kurang berhasil**).
5. Capaian kinerja kegiatan lainnya antara lain:
 - a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN;
 - b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
 - c. Laboratorium tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
 - d. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
 - e. Laboratorium tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
 - f. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010.
 - g. Menerima penghargaan Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - h. Menerima penghargaan Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Pertanian.
6. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2021 sebesar Rp 38.119.220.000,00. dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 32.401.981.755,00 (85,00%). Sedangkan Realisasi PNBP Tahun 2021 mencapai Rp. 3.208.864.491,00 (128,35%) dari Target Rp. 2.500.000.000,00.

7. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
 - a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium/BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
 - b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian pegawai yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
8. Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:
 - a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian dan optimalisasi sarana/fasilitas kandang pengujian, peningkatan kapasitas dan breeding hewan percobaan.
 - b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut, melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan reagen, standar zat aktif, dan seedantang.
9. Realisasi pengadaan bantuan ternak tidak sesuai target karena ketidaksanggupan penyedia menyelesaikan pekerjaan (wanprestasi) sehingga dilakukan pemutusan kontrak. Sesuai dengan ketentuan pengadaan, penyedia sudah ditetapkan dalam daftar hitam dengan segala konsekuensinya.
10. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
 - a. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - b. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.

Keberhasilan yang telah dicapai di BBPMSOH tidak terlepas dari dukungan *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja BBPMSOH kepada masyarakat (publik).

Bogor, 28 Januari 2022

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan



drh. Maidaswar, M.Si

NIP. 196705191994031001 ➔

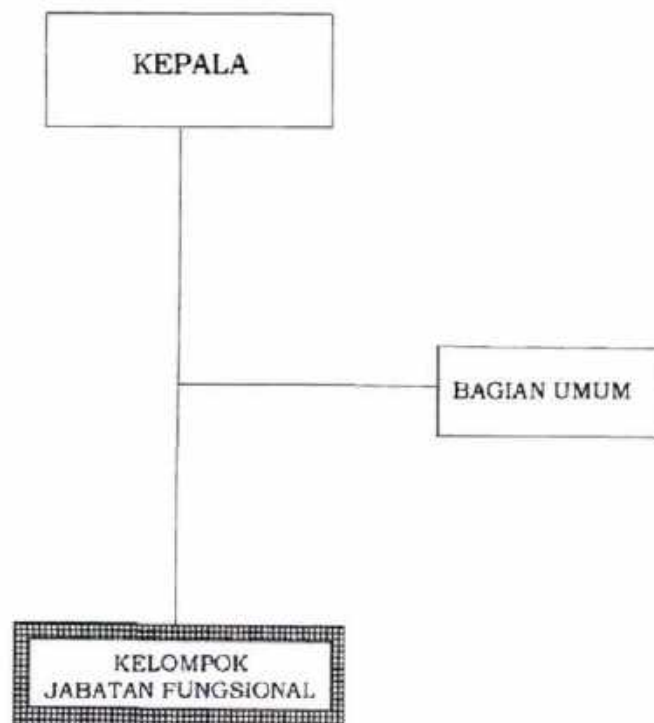
AP

LAMPIRAN 1
Struktur Organisasi BBPMSOH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

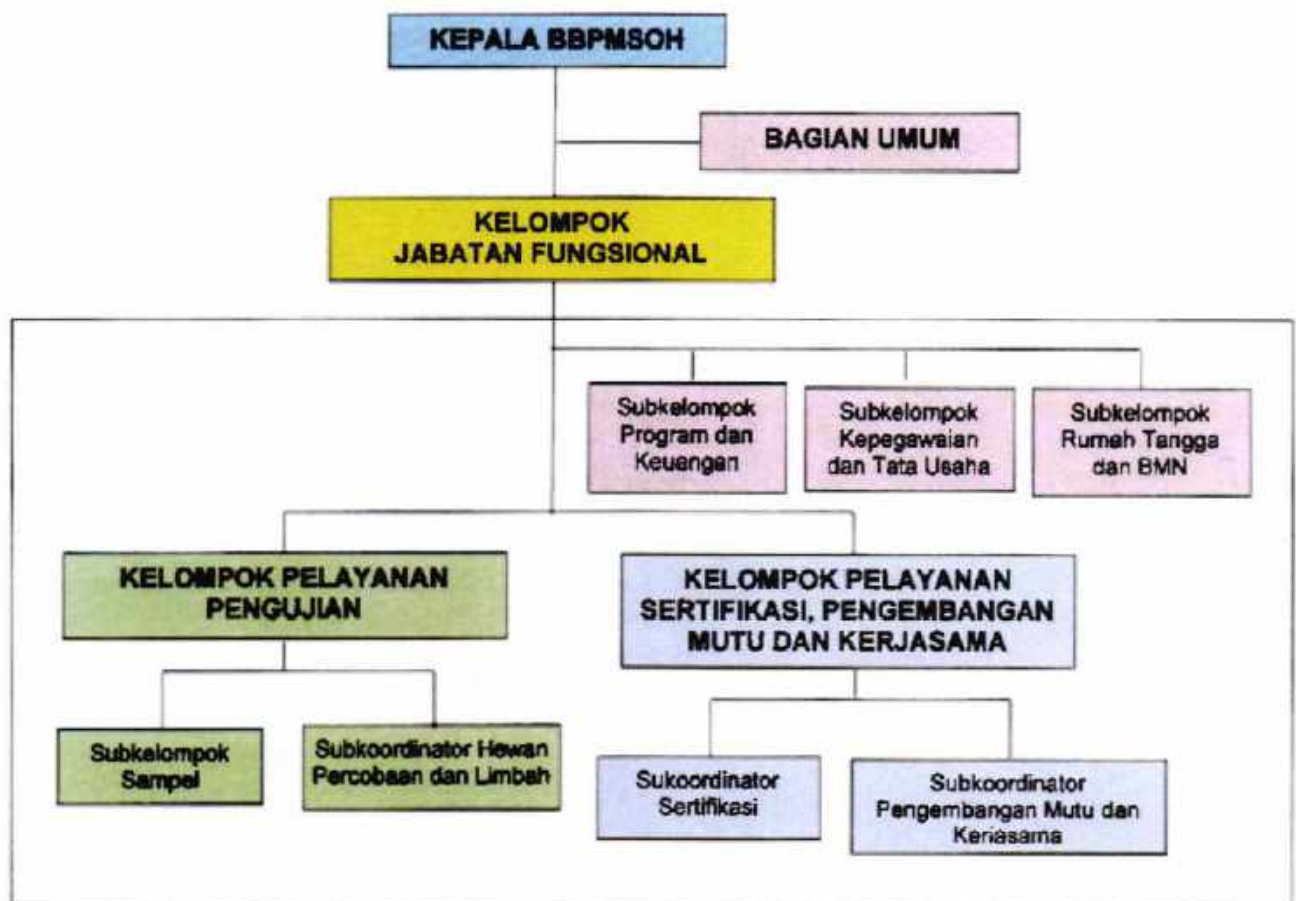
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Pusvetma, BBPMSOH, BB-Vet, BBIB dan BBPTU-HPT Baturraden



STRUKTUR ORGANISASI BBPMSOH

Struktur organisasi BBPMSOH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Bagian Kedua Balai Besar Pengujian Mutu Sertifikasi Obat Hewan Pasal 7-11. Sedangkan Pengaturan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :



LAMPIRAN 2
Dokumen Perjanjian Kinerja BBPMSOH
Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maidaswar

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
(BBPMSOH) Gunung Sindur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2021

Kepala Balai,



Maidaswar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maidaswar

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) Gunung Sindur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nasrullah

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Nasrullah



Maidaswar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
(BBPMSOH) GUNUNG SINDUR

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp **38.119.220.000,-** (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (3,00%); II (10,00%); III (15,00%); IV (20,00%); V (25,00%); VI (30,00%); VII (35,00%); VIII (40,00%); IX (50,00%); X (75,00%); XI (90,00%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran :
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) :

II. Kinerja Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BBPMSOH	3,35 Skala Likert
2.	Meningkatnya penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerima bantuan Ternak Ruminansia Potong	59 Kelompok Masyarakat
3.	Meningkatnya layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	Jumlah Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	1.700 Produk (Hasil Uji/ Sertifikat)

III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

MAK	Kegiatan	Anggaran	%
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 10.810.999.000,-	28,36%
1785	Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan produksi ternak	Rp 16.088.642.000,-	42,21%
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 11.219.579.000,-	29,43%
Jumlah		Rp 38.119.220.000,-	100,00%
Terbilang : (Tiga Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

Jakarta, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Nasrullah



Maidaswar

LAMPIRAN 3

Salinan Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2015,
ISO 17025:2017 dan Akreditasi ASEAN



GARUDA SERTIFIKASI
INDONESIA

CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certify that

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPM SOH)

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Quality Management System

SNI ISO 9001 : 2015

Scope of registration

Pengujian Mutu, Sertifikasi, Pengkajian dan Pemantauan Obat Hewan



EA Code	: 13.21, 38.75
Certificate No.	: G.01 – ID0118 – X – 2021
Original Date	: 06 October 2021
Issue Date Certificate	: 06 October 2021
Planning to be 1st Surveillance	: 06 September 2022
Planning to be 2nd Surveillance	: 06 September 2023
Planning to be Renewal	: 06 August 2024
Expired Date Certificate	: 05 October 2024

DIRECTOR

To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x, Ubung, Denpasar Utara, Bali – Indonesia

Telp : 0361-8947607, Email : info@gserti.com, Website : www.gserti.com





CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the

**National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL)
Gunung Sindur, Bogor, Indonesia**

has been approved by the ASEAN Member States and endorsed by the
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)
in accordance with the requirements of

**PROTOCOL FOR RECOGNITION OF ASEAN REFERENCE LABORATORIES
FOR ANIMAL VACCINE TESTING**

for

the testing of the following animal vaccines:

Re-accreditation:

- a. Newcastle Disease Vaccine, live
- b. Newcastle Disease Vaccine, inactivated
- c. Marek's Disease Vaccine, live
- d. Infectious Laryngotracheitis Vaccine, live
- e. Infectious Bronchitis Vaccine, live
- f. Infectious Bronchitis Vaccine, inactivated
- g. Egg Drop Syndrome '76 Vaccine, inactivated
- h. Fowl Cholera Vaccine, inactivated
- i. Haemophilus paragallinarum Vaccine, inactivated

Approval Certificate No. : ASEAN/Vaccine/006
Date of Approval : 21 October 2020
Certificate Expiry : 21 October 2025

SECRETARY-GENERAL OF ASEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dato LJM Jock Ho', is positioned above the name.

DATO LJM JOCK HOI

LAMPIRAN 4

Salinan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
Sistem Mutu Anti Penyuapan (SMAP)
(ISO 37001:2016), dan Sertifikat Sistem Mutu
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO
45001:2018



PIAGAM PENGHARGAAN



HARI ANTIKORUPSI
SEDUNIA 2021
1001 Yth. Menteri Kabinet dan Kabinet

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPM SOH) GUNUNG SINDUR

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



Jakarta, 20 Desember 2021

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPM SOH) GUNUNG SINDUR

Unit Kerja ini telah meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Apabila ditemukan praktek pungutan liar, calo, gratifikasi
dan aduan atas unit kerja ini maka dapat memasukkan aduan ke
www.lapor.go.id dan pmpzi.menpan.go.id



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjo Kumolo



qrcodepmpzi



qrcodelapor



KEMENTERIAN PERTANIAN

SERTIFIKAT

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menetapkan:

**BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMOSH) GUNUNG SINDUR**

Sebagai,

**UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS *dari* KORUPSI**

TAHUN 2021

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 2021

MENTERI PERTANIAN,



DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH



CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certificate that

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH)

Jalan Raya Pembangunan Gunung Sindur, Bogor 16340

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has implemented Anti-Bribery Management System

SNI ISO 37001 : 2016

Scope of registration

Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan



Certificate No.	: G.05 - ID0118 - I - 2019
Original Date	: 07 January 2019
Issue Date Certificate	: 07 January 2019
Planning to be 1st Surveillance	: 07 December 2020
Planning to be 2nd Surveillance	: 07 December 2021
Planning to be Renewal	: 07 November 2022
Expired Date Certificate	: 06 January 2022

To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode



DIRECTOR

CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certify that

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH)

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA
and has Implemented Occupational Healthy & Safety Management System

ISO 45001 : 2018

Scope of registration

Pengujian Mutu, Sertifikasi, Pengkajian dan Pemantauan Obat Hewan



EA Code	: 36.84
Certificate No.	: G.06 – ID0118 – XI – 2019
Original Date	: 07 November 2019
Issue Date Certificate	: 07 November 2019
Planning to be 1st Surveillance	: 07 October 2020
Planning to be 2nd Surveillance	: 07 October 2021
Planning to be Renewal	: 07 September 2022
Expired Date Certificate	: 06 November 2022

DIRECTOR

To verify the validity of this certificate please visit www.gserti.com or scan this barcode

PT. GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA, Jl. Pidadada XI, Perum Griya Loka, Kav. 11, No. 9x Ilhune

Tel. 0261 8811111

LAMPIRAN 5

Rekapitulasi Capaian Fisik Tahun 2021 dan Nilai Kinerja
BBPM SOH berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian
Keuangan Tahun 2021

REKAPITULASI HASIL UJI
BULAN JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PENGUJIAN	TARGET SAMPEL TAHUNAN	REALISASI SERTIFIKAT / HASIL UJI						TMS	
			REALISASI SERTIFIKAT / HASIL UJI	% REALISASI	2021	2020	2021	2020		
I	Sertifikasi (DU dan DB)									
a	Virologi	85	64	75.3	54	10	48	10	6	0
b	Bakteriologi	37	28	75.7	23	5	22	4	1	1
c	Farmasetik	288	731	253.8	705	26	646	23	59	3
	Jumlah I	410	823	200.7	782	41	716	37	66	4
	Sampling Sewaktu-waktu	100	114	114.0	109	5	103	4	6	1
II	Kriman Daerah	150	299	199.3	292	7	285	6	7	1
III	Pelayanan Teknis	25	63	252.0	61	2	61	2	0	0
	Sub Total (I+II+III)	685	1299	189.6	1244	55	1165	49	79	6
IV	Pengkajian									
a	Bakteriologi	185	352	190.3	352	0	340	0	12	0
b	Virologi	520	557	107.1	557	0	538	0	19	0
c	Farmasetik	200	532	266.0	532	0	532	0	0	0
V	Pemantauan	110	193	175.5	193	0	193	0	0	0
	Sub Total (IV+V)	1015	1634	161.0	1634	0	1603	0	31	0
	TOTAL	1700	2933	172.5	2878	55	2768	49	110	6

Ket. Memenuhi Syarat (MS) Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Mengetahui
Koordinator Kelompok PSPMK



drh Emilia, M Si
NIP 197012022002122001

Koordinator Substansi Pelayanan Pengujian



drh Hary Mucharini
NIP 196405221992032002

SubKoordinator Kelompok PS

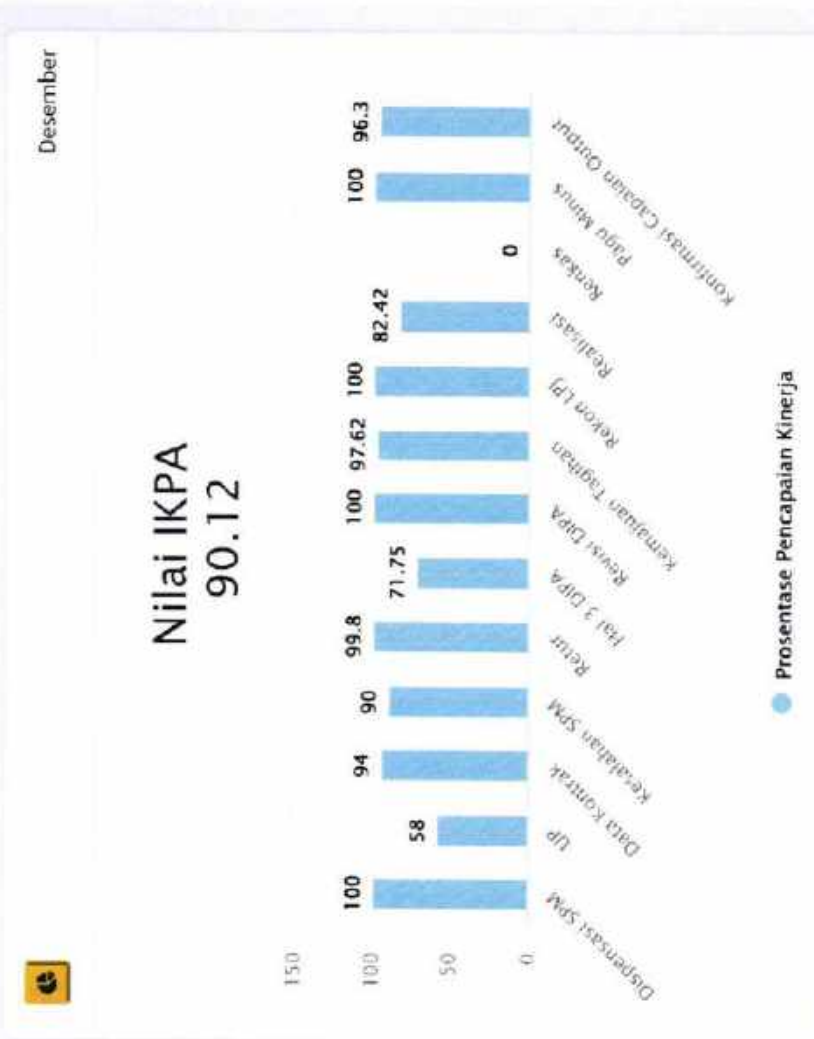
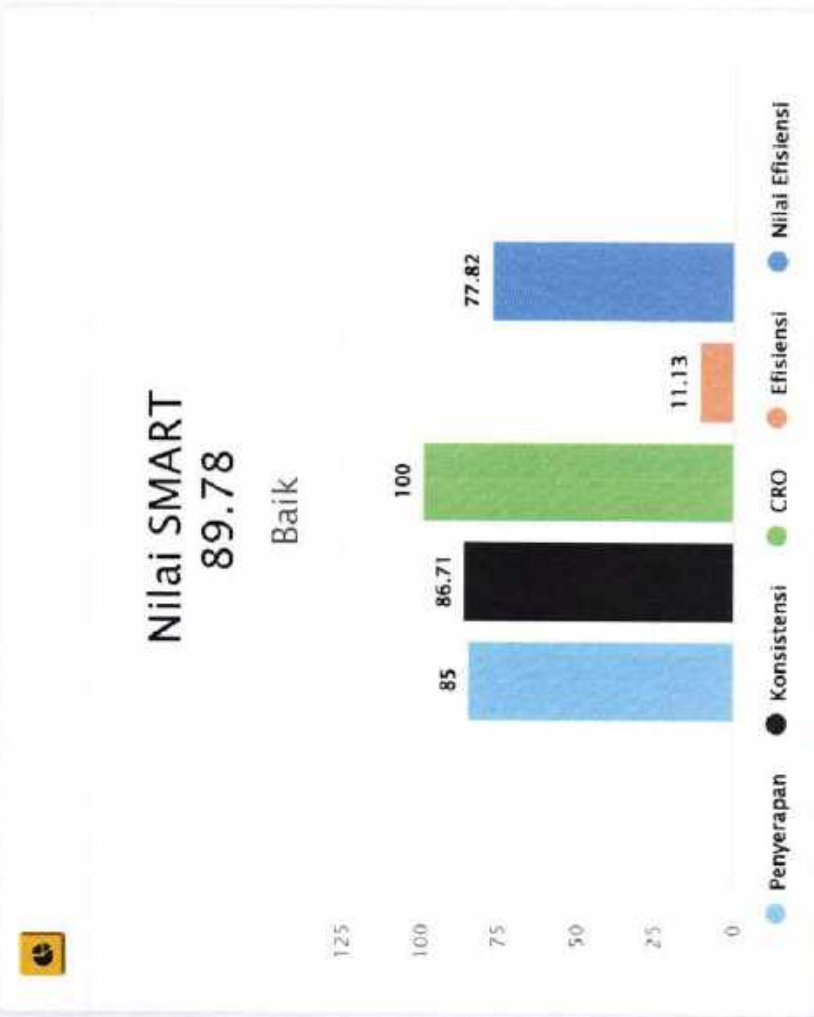


drh Muhammad Zahid, S Si, M Sc
NIP 197810272003121002

Capaian Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	% Realisasi 2021 terhadap Target 2021	% Realisasi 2021 terhadap Realisasi 2020	Target Jangka Menengah (Tahun 2024)	% Realisasi 2021 terhadap Target Jangka Menengah (2024)
Meningkatnya Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi)	410	702	823	200,73%	117,23%	375	219,46%
	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis	25	51	63	252,00%	123,62%	40	157,50%
	Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan)	100	102	114	114,00%	111,76%	120	95,00%
	Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas	150	240	299	199,33%	124,58%	165	181,21%
	Jumlah sampel pengkajian obat hewan	805	1.104	1.441	156,22%	130,52%	960	150,10%
	Jumlah sampel pemantauan obat hewan	110	133	193	175,45%	145,11%	140	137,86%
	Jumlah total Layanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan	1.700	2.332	2.933	172,62%	125,77%	1.800	162,94%

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN



LAMPIRAN 6

Pagu dan Realisasi Anggaran

BBPM SOH per Output Kegiatan sampai dengan

31 Desember 2021

Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per Output Kegiatan sampai dengan
Tanggal 31 Desember 2021

Kegiatan	Kode Output		Target Fisik	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Fisik (%)	Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk (Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan)	1.700 Produk	2.933 Produk (Hasil Uji/Sertifikat)	172,52	10.810.999.000	10.799.767.277	99,90
	JUMLAH (1784)					10.810.999.000	10.799.767.277	99,90
Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (1785)	1785.AEA	Koordinasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	250.000.000	246.317.140	98,53
	1785.QEH	Bantuan kelompok Masyarakat (Sapi Potong)	68 Kelompok Masyarakat	35 Kelompok Masyarakat	59,32	15.838.642.000	10.167.050.491	64,19
	JUMLAH (1785)					16.088.642.000	10.413.367.631	64,72
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.EAA	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran)	1 Layanan	1 Layanan	100,00	10.971.012.000	10.947.830.173	99,79
	1787.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	204.984.000	197.828.874	96,51
	1787.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	1 Layanan	1 Layanan	100,00	40.000.000	39.800.000	99,50
	1787.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1 Layanan	1 Layanan	100,00	3.583.000	3.390.000	94,61
	JUMLAH (1787)					11.219.579.000	11.188.846.847	99,73
JUMLAH						38.119.220.000	32.401.981.755	85,00

Sumber Data: Sub Bagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2021

**TABEL EFISIENSI DAN NILAI EFISIENSI PER OUTPUT KEGIATAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TA. 2021**

No.	Satker	Program	Kegiatan	KRO	Alokasi Anggaran KRO	Realisasi Anggaran KRO	CRO per KRO	Alokasi Anggaran KRO x CRO	(Alokasi Anggaran CRO) - Realisasi Anggaran KRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi (NE)
1	41192 BBPMSOH	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1784 Pengendalian dan Peningkatan Penyakit Hewan	QJA Penyidikan dan Pengujian Produk (Produk)	10.810.998.000	10.799.767.277	173%	18.652.152.961	7.852.385.704	42,10%	155,25%
2	41192 BBPMSOH	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	AEA Koordinasi (kegiatan)	250.000.000	246.317.140	100%	250.000.000	3.682.860	1,47%	53,08%
3	41192 BBPMSOH	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1785 Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	QEH Bantuan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	15.836.642.000	10.167.050.491	59%	9.395.804.576	-771.245.915	-8,21%	29,48%
4	41192 BBPMSOH	WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Peternakan	EAA Layanan Perkantoran (Layanan)	10.971.012.000	10.947.830.173	100%	10.971.012.000	23.181.827	0,21%	50,53%
5	41192 BBPMSOH	WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Peternakan	EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (Layanan)	204.984.000	197.826.674	100%	204.984.000	7.157.326	3,49%	58,73%
6	41192 BBPMSOH	WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Peternakan	EAI Layanan Kehumasan dan Protokolier (Layanan)	40.000.000	39.800.000	100%	40.000.000	200.000	0,50%	51,25%
7	41192 BBPMSOH	WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Peternakan	EAI Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (Laporan)	3.583.000	3.330.000	100%	3.583.000	193.000	5,39%	53,47%
JUMLAH					38.119.220.000	32.401.981.755		39.517.536.557	7.115.554.802	18,01%	95,02%

LAMPIRAN 7

Sumber Daya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31
Desember 2021

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gol Ruang periode Desember 2021.

No.	Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
1.	IV/d	1	-	1
2.	IV/c	2	-	2
3.	IV/b	1	-	1
4.	IV/a	11	-	11
5.	III/d	26	-	26
6.	III/c	5	-	5
7.	III/b	12	-	12
8.	III/a	5	-	5
9.	II/d	5	-	5
10.	II/c	8	-	8
11.	II/b	1	-	1
12.	II/a	1	-	1
13.	I/d	-	-	-
14.	I/c	-	-	-
Jumlah		78	-	78

Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin periode Desember 2021

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	-	2	2
2.	Master (S2)/ Dokter Hewan	8	16	24
3.	S1/D4	5	5	10
4.	D3	3	8	11
5.	SLTA	20	11	31
6.	SD/SLTP	-	-	-
Jumlah		36	42	78

Data Seluruh Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Total (Orang)	Status Kepegawaian		
			PNS	CPNS	KONTRAK
1.	Doktor (S-3)	2	2	-	-
2.	Master (S-2)/Dokter Hewan	24	24	-	-
3.	Sarjana (S-1/D4)	22	10	-	11
4.	Diploma (D-3)	11	11	-	-
5.	SLTA	46	31	-	14
6.	SLTP	4	-	-	4
7.	SD	3	-	-	3
Jumlah		110	78	-	32

Sumber Data: Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha BBPMSOH, 2021

LAMPIRAN 8

Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert Tahun 2021

Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert Tahun 2021

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BBPMSOH GUNUNG SINDUR DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN BULAN DECEMBER 2021																																	
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">NILAI IKM</div> <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 0;">96</div>	<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">NAMA UNIT : BBPMSOH GUNUNG SINDUR</div> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">RESPONDEN</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Jumlah :</td> <td colspan="3">157 Orang</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin :</td> <td>L : 35 Orang</td> <td>P : 156 Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pendidikan :</td> <td>SD : - Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SLTP : - Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SLTA : 1 Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DSD/SDH : - Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>S1 : 153 Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>S2 Keatas : 3 Orang</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 10px;">Periode Survey: 01 Jan 2021 s.d 31 Dec 2021</p>	Jumlah :	157 Orang			Jenis Kelamin :	L : 35 Orang	P : 156 Orang		Pendidikan :	SD : - Orang				SLTP : - Orang				SLTA : 1 Orang				DSD/SDH : - Orang				S1 : 153 Orang				S2 Keatas : 3 Orang		
Jumlah :	157 Orang																																
Jenis Kelamin :	L : 35 Orang	P : 156 Orang																															
Pendidikan :	SD : - Orang																																
	SLTP : - Orang																																
	SLTA : 1 Orang																																
	DSD/SDH : - Orang																																
	S1 : 153 Orang																																
	S2 Keatas : 3 Orang																																
<p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT</p>																																	

NILAI INDIKATOR PELAYANAN
 A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00 B (Baik) : 76.61 - 88.30 C (Kurang Baik) : 65 - 76.60 D (Tidak Baik) : 25 - 64.99

$$\text{Nilai Indeks (IKM)} = \frac{\text{Total nilai IKM}}{\text{Total nilai Maksimal}} \times \text{Nilai Maksimal Skala Likert}$$

$$= \frac{96}{100} \times 4$$

$$= 0,96 \times 4$$

$$\text{Nilai Indeks (IKM)} = 3,84 \text{ Skala Likert}$$

LAMPIRAN 9

Dokumen Pendukung Pencapaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penyediaan Benih dan Bibit Serta
Peningkatan Produksi Ternak
(Pengadaan Ruminansia Potong)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SURAT TUGAS

Nomor: 28071/PK.010/F/05/2021

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kecukupan pangan asal ternak diperlukan peningkatan populasi dan produktifitas ternak melalui pemasukan maupun penyediaan dalam negeri demi mewujudkan komoditas andalan negeri;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan penyediaan asal pemasukan maupun dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b serta agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, perlu penugasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Dasar :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

Memberi Tugas:

Kepada : Kepala UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana ditugaskan dalam Surat Penugasan ini.

Untuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai organisasi dan tata kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disamping pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, melaksanakan penugasan lainnya yakni:
 - a. Kepala BB-Vet Denpasar, Kepala BBPMSOH, Kepala BPMSP Bekasi, Kepala B-Vet Subang, Kepala B-Vet Lampung, Kepala BIB Lembang, Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas, Kepala BPTU-HPT Denpasar dan Kepala BPTU-HPT Sembawa, melaksanakan penyediaan sapi potong asli/lokal/persilangan/eks impor Tahun Anggaran 2021;

- b. Kepala BBIB Singosari, Kepala BBPTU-HPT Baturraden, Kepala BPTU-HPT Sembawa, Kepala BIB Lembang dan Kepala BET Cipelang, melaksanakan penyediaan sapi potong impor/ex impor/Persilangan/lokal Tahun Anggaran 2021;
 - c. Kepala BIB Lembang, melaksanakan penyediaan sapi potong impor (*Wagyu*) Tahun Anggaran 2021
 - d. Kepala BPTU-HPT Pelaihari, melaksanakan penyediaan kambing dan/atau domba impor Tahun Anggaran 2021; dan
 - e. Kepala Pusvetma Surabaya, Kepala BB-Vet Maros, Kepala BET Cipelang, Kepala BPMSPH Bogor, Kepala BPTU-HPT Denpasar, Kepala BPTU-HPT Pelaihari, Kepala BPTU-HPT Indrapuri, Kepala B-Vet Medan dan Kepala B-Vet Bukittinggi, melaksanakan penyediaan kambing dan/atau domba lokal Tahun Anggaran 2021.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap potensi permasalahan maupun kegagalan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dengan Tim Supervisi, pakar dan/atau ahli serta instansi terkait lainnya;
4. Menyampaikan laporan secara tertulis perkembangan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
 - a. setiap 1 (satu) bulan sekali; atau
 - b. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Melaksanakan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Surat Tugas Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dibebankan pada anggaran DIPA revisi per tanggal 20 April 2021 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Tugas untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 28 Mei 2021

Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581-83, 78847319
Telp./Fax. (021) 7815781, 7811385
Website : <http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 01001 /PK. 210 /F /09 /2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

01 September 2021

Kepada Yth. (Terlampir)
Di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Ditjen Anggaran Nomor S-679/AG/AG.3/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker lingkup Ditjen PKH (Revisi ke-9), bahwa terdapat penambahan alokasi anggaran pada Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Komoditas Sapi Potong sebanyak 1.100 ekor. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

3. Pelaksana Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Komoditas Sapi Potong sebanyak 1.100 ekor adalah (i) BPTU HPT Indrapuri 80 ekor, (ii) BVet Lampung 140 ekor, (iii) BVet Subang 200 ekor, (iv) BBPMSOH 180 ekor, (v) BPMSPH 120 ekor, (vi) BPMSP Bekasi 180 ekor, (vii) BVet Banjarbaru 100 ekor, dan (viii) BBVet Maros 100 ekor.
4. Kriteria Lokasi dan penerima penerima manfaat serta acuan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 7542/Kpts/HK.160/F/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 11161/KPTS/PK.000/F/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun 2021.
5. Berdasarkan point 1 dan 2, pelaksana kegiatan agar (i) Segera berkoordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lokasi penerima manfaat, (ii) melaksanakan verifikasi calon penerima manfaat (daftar lokasi dan calon penerima manfaat sebagaimana terlampir), (iv) melaksanakan setiap tahapan/prosedur pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, dan (v) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Direktur Jenderal

Dr. Ir. Nasrullah, MSc
NIP. 196602231993031001

Nomor : 01001 / PK.210 / F / 09 / 2021

Tanggal : 01 - September - 2021

Lampiran. Daftar Penerima

1. Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH)
2. Kepala Balai Besar Veteriner Maros
3. Kepala BPTU HPT Indrapuri
4. Kepala Balai Veteriner Lampung
5. Kepala Balai Veteriner Subang
6. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMS PH)
7. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMS P)
8. Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

[illegible]

[illegible]

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alokasi Ternak	Breed sapi	Ket.	Surat Rekomendasi Dinas	Proposal	Simluntan	Kuisoner	Form.3 Pernyataan Kesanggupan Poktan	Form.1 Pernyataan Kesanggupan Kades	Form.2 Pernyataan Kesanggupan Kades	Form.7 BA Hasil Verifikasi CPCL
6	Jatim	Madun	Agro Willis	Aguswanto	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Jatim	Madun	Wono Lestari	Suyut	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Jatim	Bilar	Sukses Makmur	Wasbir Alama	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TAHAP 1					Jumlah	160									
1	Banten	Kota Serang	Bina Tani Ternak Lopang	Isap selameti nyadi	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Banten	Lebak	Muda Karya	Hendriyana	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Banten	Kab. Serang	Mitra Tani	Fachrizal	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Banten	Kota Cilegon	Villa Ternak Mandiri	Abdullah	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TAHAP 2					Jumlah	80									
1	Banten	Kota Cilegon	Tunas Mandiri	Toni Burhansyah	20	Sapi PO/silangan	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TAHAP 1					Jumlah	20									
1	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Mandiri Maju	Yasri Hi Kabar	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Telaga Damai	Marjuk Sangaji	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Dadi Haya	Silas Lerwens	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Maluku Utara	Morotai	Poporoco Indah	Syualib Moro	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TAHAP 2					Jumlah	80									
1	Maluku	Maluku Tengah	Sugih Makmur	Darmawati	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Maluku	Maluku Tengah	Talenta	Yessi Pomes	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Maluku	Maluku Tengah	Mabes Desa	David Calvin Manuputy	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Maluku	Seram Bagian Barat	Lembu Makmur	Paijan	20	Sapi Bali	Aspirasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
TOTAL					Jumlah	1180									

Mengetahui,
Koordinator Kelompok PSPMK

drh. Emilia, M. Si.
NIP. 197012022002122001

Sub Koordinator Kelompok PMK

drh. Lili, Sri Astuti.
NIP. 197612282008012008

**CAPAIAN REALISASI KEGIATAN
 PENGADAAN RUMINANSIA POTONG TA.2021**

TAHAP I

NO	LOKASI DISTRIBUSI		NAMA KELOMPOK	TARGET (ekor)	REALISASI (ekor)	Jenis Rumpun Sapi
	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA				
1	Jawa Timur	Trenggalek	Mugi Lestari	20	20	PO/silangan
2	Jawa Timur	Bojonegoro	Mustika Mandiri	20	20	PO/silangan
3	Jawa Timur	Lamongan	Mitra Makmur	20	20	PO/silangan
4	Jawa Timur	Situbondo	Awar-awar Sejahtera	20	20	PO/silangan
5	Jawa Timur	Nganjuk	Sri Rejeki	20	15	PO/silangan
6	Jawa Timur	Nganjuk	Sumber Tani Utomo	20	20	PO/silangan
7	Jawa Timur	Nganjuk	Pule Sejahtera	20	20	PO/silangan
8	Jawa Timur	Tuban	Karya Makmur Sejati	20	20	PO/silangan
9	Jawa Timur	Magetan	Rukun Mulyo	20	20	PO/silangan
10	Jawa Timur	Mojokerto	Sri Rejeki Dua	20	20	PO/silangan
11	Jawa Timur	Mojokerto	Tani Utomo II	20	20	PO/silangan
12	Jawa Timur	Mojokerto	Margo Rukun	20	20	PO/silangan
13	Jawa Timur	Mojokerto	Mekar Sari	20	20	PO/silangan
14	Jawa Timur	Blitar	Sumber Makmur	20	20	PO/silangan
15	Jawa Timur	Blitar	Serbaguna	20	-	PO/silangan
16	Jawa Timur	Blitar	Utomo Karyo	20	-	PO/silangan
17	Jawa Timur	Blitar	Sopo Ngiro	20	-	PO/silangan
18	Jawa Timur	Blitar	Sumber Klampok	20	-	PO/silangan
19	Jawa Timur	Blitar	Ngudi Rahayu 1	20	-	PO/silangan
20	Jawa Timur	Blitar	Sedia Makmur	20	-	PO/silangan
21	Jawa Timur	Blitar	Taruma Tani	20	-	PO/silangan
22	Jawa Timur	Jombang	Kedungotok	20	-	PO/silangan
23	Jawa Timur	Jombang	Sumber Sapon	20	-	PO/silangan
24	Jawa Timur	Jombang	Berkah Tamma	20	-	PO/silangan
25	Jawa Timur	Jombang	Jampirogo	20	-	PO/silangan
26	Jawa Timur	Madiun	Seneng Makmur	20	-	PO/silangan
27	Jawa Timur	Madiun	Tani Mulyo	20	-	PO/silangan
28	Jawa Timur	Madiun	Anom Tani	20	-	PO/silangan
29	Jawa Timur	Madiun	Bina Taruna	20	-	PO/silangan
30	Jawa Timur	Madiun	Mulyo Sejahtera	20	-	PO/silangan
31	Jawa Timur	Bangkalan	Karya Mulya	20	-	Madura
32	Jawa Timur	Bangkalan	Ingin Makmur-I	20	-	Madura
33	Jawa Timur	Bangkalan	Wijaya Kusuma IV	20	-	Madura
34	Jawa Timur	Bangkalan	Rukun Makmur	20	-	Madura
35	Jawa Timur	Sumenep	Sumber Bahagia	20	-	Madura
36	Jawa Timur	Sumenep	Baru Bangkit	20	-	Madura
37	Jawa Timur	Sumenep	Berkah Jaya	20	-	Madura
38	Jawa Timur	Pamekasan	Idaman Tani	20	-	Madura
Jumlah Jawa Timur I				760	275	
39	Banten	Kota Serang	Bina Tani Ternak	20	20	PO/silangan
40	Banten	Lebak	Muda Karya	20	20	PO/silangan
41	Banten	Kota Cilegon	Villa Ternak Mandiri	20	20	PO/silangan
41	Banten	Kab. Serang	Mitra Tani	20	20	PO/silangan
Jumlah Banten				80	80	
43	Maluku	Maluku Tengah	Sugin Makmur	20	20	Bali
44	Maluku	Maluku Tengah	Talenta	20	20	Bali
45	Maluku	Maluku Tengah	Mabes Desa	20	20	Bali
46	Maluku	Seram Bagian Barat	Lembu Makmur	20	20	Bali
Jumlah Maluku				80	80	
47	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Mandiri Maju	20	20	Bali
48	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Telaga Damai	20	20	Bali
49	Maluku Utara	Pulau Taliabu	Dadi Haya	20	20	Bali
50	Maluku Utara	Morotai	Poporoco Indah	20	20	Bali
Jumlah Maluku Utara				80	80	
Jumlah Tahap I				1000	515	

TAHAP II

NO	LOKASI DISTRIBUSI		NAMA KELOMPOK	TARGET (ekor)	REALISASI (ekor)	KET.
	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA				
1	Jawa Timur	Madiun	Gapoktan Sogo	20	20	PO/silangan
2	Jawa Timur	Blitar	Sukses Makmur	20	20	PO/silangan
3	Jawa Timur	Jombang	Sumber Rejeki	20	20	PO/silangan
4	Jawa Timur	Madiun	Wono Lestari	20	20	PO/silangan
5	Jawa Timur	Probolinggo	Harapan Tani II	20	20	PO/silangan
6	Jawa Timur	Madiun	Agro Wilis	20	20	PO/silangan
7	Jawa Timur	Lumajang	Rukun Makmur II	20	20	PO/silangan
8	Jawa Timur	Sumenep	Almubarakah	20	20	PO/silangan
Jumlah Jawa Timur II				160	160	Madura
1	Banten	Kota Cilegon	Tunas Mandiri	20	20	PO/silangan
Jumlah Tahap II				180	180	
Jumlah Total				1180	695	



Kepala Balai Besar,

drh. Maidaswar, M.Si

NIP. 196705191994031001